

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Salah satu factor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan terjadi akan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Seringkali bila perselisihan yang dimaksud tidak dapat di atasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga yang tadinya rukun dapat mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*).

Meskipun demikian, dari pihak pemerintah sudah dari dini memberikan arahan akan timbulnya hal tersebut, maka disini pemerintah mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang, merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85 sampai 97.

Masalah harta bersama suami istri memang belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab fikih, karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam rumah tangga hanya mengurus suami, harta suami, serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya.¹

Kompilasi hukum Islam memberikan ketegasan wewenang tentang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama.” Ini artinya permasalahan harta bersama harus diselesaikan secara hukum islam.²

Mengingat pembagian harta bersama suami istri masih berdasarkan kepada ijtihad para hakim Pengadilan Agama, maka masalah pembagian harta bersama ini penulis angkat dalam pembahasan penelitian skripsi tentang harta bersama akibat perceraian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta (Analisis Putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska).”

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 212.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Mamahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 141.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Acara Perdata dalam peradilan dalam putusan perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.

Manfaat:

1. *Teoritik*, sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan tentang sengketa harta bersama akibat perceraian. Sehingga diharapkan nantinya mampu mengembangkan khazanah keilmuan di bidangnya dan sebagai bahan penelitian.
2. *Praktis*, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Surakarta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Islam.